

**RESPON PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP  
PENUNDAAN PENGIRIMAN PESAWAT TEMPUR SUKHOI  
SU-35 OLEH RUSIA TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya demi  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional**



**Oleh :**

**AHMAD AFIFUDDIN FAJRIN  
NIM. I72216051**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
2020**

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Afifuddin Fajrin

NIM : I72216051

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Penundaan  
Pengiriman Pesawat Tempur Sukhoi Su-35 oleh Rusia  
Tahun 2019**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Penulis bersedia menanggung semua konsekuensi hukum bila ternyata pada kemudian hari diketahui atau terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa skripsi tersebut merupakan hasil plagiasi.

Surabaya, 7 Agustus 2020

Yang menyatakan,

  
**Ahmad Afifuddin Fajrin**  
NIM. I72216051

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Afifuddin Fajrin

NIM : 172216051

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: **“Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Penundaan Pengiriman Pesawat Tempur Sukhoi Su-35 oleh Rusia Tahun 2019,”** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 10 Agustus 2020

Pembimbing



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA

NUP. 201409001

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Ahmad Afifuddin Fajrin: “Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Penundaan Pengiriman Pesawat Tempur Sukhoi Su-35 oleh Rusia Tahun 2019” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 7 Agustus 2020.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA.  
NUP. 201409001

Penguji II



M. Fathoni Hakim, M. Si  
NIP. 198401052011011008

Penguji III



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.  
NIP. 198408232015031002

Penguji IV



Rizki Rahmadini Nurika, S. Hub. Int., M.A.  
NIP. 199003252018012001

Surabaya, 7 Agustus 2020

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad.Dip.SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D  
NIP. 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Afifuddin Fajrin  
 NIM : 172216051  
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional  
 E-mail address : ahmad.afifuddinsees@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Respons Pemerintah Indonesia Terhadap Penundaan Pengiriman Pesawat Tempur Su-35 oleh Rusia Tahun 2019

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Agustus 2020

Penulis

(Ahmad Afifuddin Fajrin)  
nama terang dan tanda tangan

















C-130 Hercules yang semuanya merupakan buatan Amerika Serikat.<sup>6</sup> Selain itu, Amerika Serikat juga menyetop penjualan senjata, termasuk tidak mau memberikan suku cadang yang diperlukan Indonesia untuk meremajakan pesawat-pesawat TNI yang dibeli dari mereka, sehingga dalam kurun waktu sepuluh tahun diembargo, membuat pesawat tempur TNI AU harus dihanggarkan.

Meskipun mendapat sanksi embargo dari Amerika Serikat, tak sekalipun mengurangi niat Indonesia untuk tetap memperkuat alutsistanya. Semenjak adanya kasus tersebut, Indonesia kembali melirik alutsista dari Rusia. Sebenarnya, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia sudah terjalin sejak masa presiden Soekarno yang saat itu masih berbentuk Uni Soviet, dan terus mengalami perkembangan. Hubungan kedua negara dibuktikan dengan adanya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia-Uni Soviet pada 12 Agustus 1956 di sektor perdagangan, di mana kerjasama ini memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak, sehingga memberikan keamanan bagi kapal-kapal Uni Soviet lalu lalang di kepulauan Indonesia.<sup>7</sup> Selanjutnya, pada tahun 1959, Uni Soviet menjual dua kapal selam dan empat kapal perang dari Laut Hitam dan

---

<sup>6</sup> Anggi Kusumadewi, “Kisah Embargo AS dan Sukhoi Rusia dibalik Jet Tempur RP”, diakses 10 Februari 2020, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160301150059-20-114600/kisah-embargo-as-dan-sukhoi-rusia-di-balik-jet-tempur-ri?>

<sup>7</sup> Dhedra Danudoro, “Russia and Indonesia: Renewal of Defense Cooperation”, diakses 7 Februari 2020, dalam <http://www.leksika.org/tacticalanalysis/2016/10/26/russia-and-indonesia-renewal-of-defense-cooperation>















berjudul “Kebijakan Indonesia Membeli Pesawat Tempur SU-35 dari Rusia Tahun 2017”, dan diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 2018 lalu.<sup>20</sup> Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan pemerintah Indonesia hingga melahirkan kebijakan yang memutuskan untuk kerjasama dengan Rusia dalam pengadaan alutsista, yaitu pesawat tempur Sukhoi Su-35. Selanjutnya, dalam melakukan analisis, penelitiannya menggunakan teori *Rational Choice*. Dalam kerjasama tersebut, Indonesia mendapat banyak keuntungan dalam bidang militer, semisal, adanya sketsa imbal dagang dengan beberapa produk komoditas Indonesia dan juga adanya *Transfer of Technology* (ToT) dari pihak Rusia dari pembelian pesawat Sukhoi, dalam bentuk *maintenance, repair, and overhaul* (MRO).

Persamaan antara penelitian Rizkita Amalia dan peneliti adalah kedua penelitian tersebut berusaha menjelaskan bahwasanya adanya keuntungan yang didapat dari pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 tersebut, yaitu dalam perkuatan dalam bidang militer udara negara Indonesia. Namun, dalam kedua penelitian tersebut juga terdapat perbedaan dalam pembahasannya, skripsi peneliti dengan judul “Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Penundaan Pengiriman Pesawat Tempur Sukhoi Su-35 oleh Rusia Tahun 2019” lebih membahas bagaimana pemerintah Indonesia merespon pengiriman pesawat tempur Sukhoi Su-35 yang mengalami penundaan di tahun 2019, sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Rizkita Amalia

---

<sup>20</sup> Rizkita Amalia, Naskah Publikasi Skripsi, “Kebijakan Indonesia Membeli Pesawat Tempur SU-35 dari Rusia Tahun 2017”, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018)

















dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok tradisional menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara.<sup>26</sup>

Dengan adanya arus globalisasi dan demokratisasi yang melanda dunia, mempengaruhi dan mewarnai peta kebijakan dan keamanan setiap negara, di mana setiap negara tentunya memiliki interdependensi satu sama lainnya. Teori keamanan nasional atau *national security* menurut Barry Buzan didefinisikan kondisi maupun sebagai fungsi yang akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tenteram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia disamping kesejahteraan. Pemahaman terhadap makna dan substansi yang terkandung di dalamnya akan bervariasi tergantung kepada tata nilai, persepsi dan kepentingan negara tersebut, dan membaginya sektor keamanan ke dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial.<sup>27</sup> Oleh karena itu, keamanan tidak dapat hanya dipahami dalam arti sempit, yaitu dari sudut pandang negara (*state security*), dengan anggapan bahwa bila rakyat sejahtera (keadaan perut kenyang), maka akan tercipta keamanan. Tindakan aparat yang dapat mengancam keamanan individu atau warga negara dan keamanan

---

<sup>26</sup> Edy Prasetyono, "Konsep-Konsep Keamanan", dalam "Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia", Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), (Jakarta: CSIS, 2006), halaman 267-269 Barry Buzan, *Op Cit.*, halaman 19-20

<sup>27</sup> Lihat Barry Buzan, "People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War", (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1991) dalam Mukhtar, Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia. *Jurnal Sociene Politics* Vol 6, No 2 Edisi November 2011 (Universitas Tribhuwana, 2016). Pp. 127-131

kurang dilihat dalam sudut pandang masyarakat. Masyarakat kurang diajak waspada terhadap kapan, bagaimana dan seperti apa ancaman keamanan itu terjadi dan berasal. Sebab, masalah keamanan muncul setelah terjadinya suatu kasus kekerasan aparat (*state violence*) terhadap masyarakat.<sup>28</sup>

Sistem pertahanan dan keamanan harus diarahkan untuk menjamin tegak dan menguatnya suatu negara bangsa (*nation state*) dari “*external threat*” dan “*domestic threat*”. Burhan D. Magenda menyebutkan tentang pentingnya memikirkan “*software*” yaitu terutama ideologi nasional serta sistem politik, ekonomi dan sosial budaya. Untuk “*hardware*”, yang paling penting adalah lembaga-lembaga yang fungsional yang merupakan sumber daya nasional seperti aparatur negara, masyarakat politik (Ormas dan LSM) serta partai politik. Juga diperlukan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil (*civil society*). Dimensi lain yang diperlukan dalam memperkuat pertahanan dan keamanan nasional adalah ketahanan pangan (*food security*) dan masalah energi (*energy security*).<sup>29</sup> Dinamika permasalahan keamanan seperti itu, akan mengubah konsep keamanan nasional yang semula dari *state center security* menjadi *people centered security*. Konsekuensinya, keamanan menjadi keamanan *comprehensive* dan manajemen keamanan membutuhkan kerjasama antar aktor dan lembaga keamanan.

---

<sup>28</sup> Kusnanto Anggoro, “*Reformasi Sektor Keamanan, Kewenangan Negara, dan Partisipasi Publik*”. Jakarta: Propatria Institute, 2005. Lihat juga, Sidratahta Mukhtar, Manajemen Keamanan Negara I dan II: Perspektif Kamdagri/Kepolisian. (Makalah FGD Propatria Institute: Jakarta, 11 September 2005)

<sup>29</sup> Prof. Dr. Burhan D. Magenda, “*Penyiapan Pertahanan Negara Ditinjau Dari Strategi Ketahanan Nasional*”, (Jakarta: FISIP UI, 23 April 2008). Hal 1-2.

Keamanan nasional juga dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pandangan ini mendukung argumentasi bahwa keamanan nasional di negara demokrasi umumnya mencakup keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia (*state security*, *public security* dan *human security*).<sup>30</sup> Militer dan kepolisian didalam sistem demokrasi, ditempatkan sebagai lembaga pemerintahan yang netral dan professional untuk menyelenggarakan fungsi pertahanan dan keamanan.

Sistem keamanan nasional yang dikenal dengan pendekatan *Security Sector Reform* (reformasi sektor keamanan/SSR), merupakan sistem keamanan nasional dengan menggunakan pendekatan partisipasi warga negara dan masyarakat (*civil society*) dalam melahirkan regulasi-regulasi keamanan, yang telah sukses diterapkan di Eropa Barat pada dekade 1990an.<sup>31</sup> Dengan demikian, spektrum dan konsep keamanan menjadi lebih luas, yaitu fokus tidak lagi terbatas pada keamanan teritorial, tetapi kepada dimensi keamanan manusia, dan kedua dari keamanan melalui pendekatan militer menjadi pendekatan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh yaitu perkembangan pendekatan ini adalah kebijakan keamanan nasional negara dalam konteks pemberantasan terorisme. Perang terhadap terorisme

---

<sup>30</sup> Lihat Letjen TNI Bambang Darmono, "*Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia*", (Yogyakarta: Jurnal Ketahanan Nasional: Nomor XV (1) April 2010. hlm. 7-8 dan 17-18

<sup>31</sup> Sidratahta Mukhtar, "*Keamanan Nasional : Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia*", Jurnal *Sociene Politics* Vol 6, No 2 Edisi November 2011 (Universitas Tribhuwana, 2016). hlm. 4.

bukan lagi mengandalkan aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional Amerika semata, tetapi melibatkan banyak lembaga keamanan dan institusi pemerintahan lainnya. Juga membangun kerjasama lintas Negara dalam format kerjasama keamanan (*security cooperation*) dengan hampir semua Negara di dunia.<sup>32</sup>

Reformasi Sektor Keamanan menyangkut dimensi keamanan dalam pengertian yang luas baik sektor militer, nirmiliter dalam menyediakan keamanan bagi masyarakat luas. Sasaran SSR adalah membentuk lembaga-lembaga keamanan baru dengan diferensiasi fungsi dan wewenang yang jelas dan komprehensif serta sistem akuntabilitas publik dari peran institusi-institusi pertahanan dan keamanan. Hal yang sangat dikedepankan dalam konteks ini adalah bagaimana membangun sistem kontrol masyarakat terhadap peranan dan dampak peran lembaga-lembaga keamanan bagi kepentingan masyarakat-manusia secara umum. Keamanan nasional suatu negara juga dipengaruhi dengan bagaimana negara memberlakukan kebijakan luar negerinya. Selanjutnya, dalam konteks ini, keamanan nasional lebih dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Teori *national security* (keamanan nasional) digunakan sebagai alat analisa dalam menjelaskan respon pemerintah Indonesia terhadap penundaan

---

<sup>32</sup> Sidratahta Mukhtar, *Pemberantasan Terorisme di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Keamanan Nasional*, makalah Seminar Sehari (Makassar: Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, 2009) hlm. 5.





atau menggentarkan musuh, memenej perluasan pengaruh, dan mendukung rezim yang bersahabat dalam menekan lawan politik domestik atau memposisikan kepentingan komersial negaranya.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Idil Syawfi, keberhasilan dari strategi diplomasi pertahanan suatu negara, merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan industri itu sendiri. Namun secara parsial, menurut Idil Syawfi terdapat karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara, sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. *Defense diplomacy for Confidence Building Measures*
2. *Defense Diplomacy for Defense Capabilities*
3. *Defense Diplomacy for Defense Industry*

*Defense diplomacy for confidence building measures* dilakukan oleh suatu negara untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, yang utamanya dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan mispersepsi antar pihak dengan cara saling terbuka dalam kebijakannya, transparansi dalam pengembangan kapabilitas militernya sehingga anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara tidak dianggap ancaman bagi negara lain.<sup>36</sup> Dengan demikian, peningkatan hubungan antar pihak yang semakin membaik, akan menurunkan intensitas kemungkinan terjadinya

---

<sup>34</sup> Hans J. Morgenthau, "*Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*", (New York: Alfred Knopf, 1948), Hlm. 6

<sup>35</sup> Idil Syawfi, "*Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), Hal. 14, dalam skripsi Arifin Multazam, "*Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*", (Jakarta : UI Press, 2010), Hlm. 18.

<sup>36</sup> Amitav Acharya, "*Constructing a Security Community in South East Asia: ASEAN and the Problem of Regional Power*", (New York: Routledge, 2001), hlm. 66.



memungkinkan bagi sebuah negara untuk dapat melakukan pembelian senjata bagi kepentingan pengembangan kekuatan pertahanannya dari negara lain.<sup>39</sup> Dalam memperkuat kapabilitas pertahanannya dan dalam mencegah atau menghadapi ancaman yang potensial, *defense diplomacy for defense capabilities* ini merupakan cara diplomasi dalam tataran yang tepat. Diplomasi tersebut dapat dilakukan dengan melalui usaha-usaha kerjasama dalam hal bantuan militer, pembelian alutsista dan kredit ekspor, pembangunan pangkalan militer, pemeberian payung hukum perlindungan baik yang dilakukan oleh negara *core* ke negara *periphery* ataupun sebaliknya.<sup>40</sup> Dengan dilakukannya *defense diplomacy for defense capabilities* tersebut, tentunya saling mempercayai antar pihak yang bekerjasama menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, diplomasi tersebut dapat menjadi tolak ukur seberapa kuat suatu negara dan seberapa lemahnya kekuatan suatu negara apabila tidak dilakukan kerjasama di bidang militer dalam pengadaan materi militer.

Diplomasi yang terakhir menurut Idil Syawfi yaitu *Defense diplomacy for defense industry*, merupakan diplomasi yang digunakan dengan tujuan pembangunan maupun penguatan dibidang industri pertahanan suatu negara. Hal ini dapat menimbulkan efek independensi politik dan ekonomi antar pihak, serta menurunkan tingkat ketergantungan dalam hal pengadaan alutsista untuk

---

<sup>39</sup> Ron Matthews, "Introduction: 'Managing' the Revolutions", dalam Ron Matthews dan John Treddnick, *Managing the Revolution in Military Affairs* (New York: Palgrave MacMilan), hlm. 1-9, dalam skripsi Arifin Multazam, "*Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*", (Jakarta : UI Press, 2010), hlm. 20.

<sup>40</sup> Idil Syawfi, "*Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 20.

pembangunan kapabilitas pertahanan, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat kerjasama.<sup>41</sup> *Defense diplomacy for defense industry* dapat dipenuhi dengan melalui kerjasama strategis antar negara dalam hal produksi senjata, kerjasama strategis antar negara dalam pengembangan dan penelitian senjata, pemberian lisensi, dan investasi dalam industri pertahanan.<sup>42</sup>

Diplomasi pertahanan digunakan oleh peneliti sebagai sebuah konsep dalam menganalisa data mengenai respon pemerintah Indonesia terhadap penundaan pengiriman pesawat tempur Sukhoi Su-35 oleh Rusia. Salah satu dari konsep diplomasi pertahanan yang secara parsial dibagi menjadi tiga oleh Idil Syawfi yaitu, *defense diplomacy for defense capabilities*, akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis respon pemerintah Indonesia dan akan menjadi sebuah gambaran yang dapat menjadi rujukan peneliti dalam menganalisa data tersebut. Selain itu, diplomasi pertahanan juga akan mempengaruhi *national security* negara Indonesia itu sendiri. Karena keberhasilan dalam melakukan diplomasi pertahanan dengan negara Rusia tentunya juga akan mempengaruhi kekuatan militer Indonesia khususnya dalam matra udara, mengingat Sukhoi Su-35 dibutuhkan oleh negara Indonesia untuk lebih memperkuat lagi kekuatan dibidang militer dan menjaga kedaulatan negara Indonesia yang memang memiliki wilayah sangat luas.

---

<sup>41</sup> Timothy D. Hoyt, *Military Industry and Regional Defense Policy: India, Iraq, Israel* (New York: Routledge, 2007), hlm. 8-9.

<sup>42</sup> Idil Syawfi, "*Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), Hlm. 20.











mengenai kasus atau fenomena yang sedang diselidiki. Penjelasan interpretasi data akan dideskripsikan melalui gambaran fenomena internasional dan data yang didapat di lapangan ataupun secara sekunder mengenai sikap Indonesia dalam merespon penundaan pengiriman pesawat tempur Sukhoi Su-35 yang dibantu dengan penggunaan konsep ataupun teori yang ada.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan oleh peneliti dengan cara daring (*online*) di Desa Kembangbahu, Kabupaten Lamongan dan melalui *library riset* di perpustakaan provinsi atau daerah. Dilaksanakan sejak bulan April 2020 hingga Juli 2020.

### **C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa (*Level of Analysis*)**

Tingkat analisa dalam sebuah penelitian, dapat juga disebut sebagai subyek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia. Sedangkan, dalam penelitian ini, objek yang akan dianalisa adalah penundaan pengiriman pesawat tempur Sukhoi Su-35 oleh Rusia.

Untuk menjelaskan tingkatan analisa dalam studi hubungan internasional, peneliti merujuk pada Mohtar Mas'ood, dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi". Tingkatan analisa menurut Mas'ood dalam bukunya menyantumkan berbagai rujukan yang berkaitan dengan tingkatan analisa. Rujukan itu antara lain dari Kenneth Waltz, J. David Singer, John Spanier, Bruce Russett dan Harvey Starr, hingga











masalah penelitian ini. Selain itu, diskusi dengan dosen dan perolehan data secara daring akan membantu dalam penemuan pola yang baik dalam kumpulan data-data yang telah diperoleh.

#### **b. Penyajian data**

Pada tahapan kedua analisa data, peneliti melakukan pemaparan data-data yang telah diperoleh sebelumnya selama proses diskusi dengan dosen dan pihak yang memiliki informasi mengenai kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia, serta data-data yang diperoleh secara daring. Penelitian dilakukan secara daring, mengingat adanya kendala pandemi *Corona* yang menyebabkan penelitian secara langsung di lapangan sulit dilakukan.

Oleh sebab itu, data disajikan dalam uraian teks yang berbentuk narasi, bagan, tabel, atau gambar yang diperoleh secara daring terkait respon pemerintah Indonesia terhadap penundaan pengiriman pesawat tempur Sukhoi Su-35.

#### **c. Penarikan kesimpulan**

Tahapan ketiga dan terakhir dari analisis data di lapangan yakni tahap penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dimulai dengan melakukan verifikasi atau pembenaran data terkait respon pemerintah Indonesia terhadap penundaan pengiriman pesawat tempur Sukhoi Su-35, lalu peneliti berusaha menemukan data-data valid yang dapat diuji kebenarannya. Data-data yang valid tersebut









yang mampu mempengaruhi arah politik luar negeri Indonesia itu sendiri. Mulai masa Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia telah mengalami beragam orientasi politik luar negeri, dari menjalin kedekatan hubungan dengan Blok Timur hingga ke Blok Barat. Pengalaman-pengalaman tersebut turut memberi warna tersendiri pada dinamika hubungan Indonesia-Rusia, bahkan sejak masih berupa Uni Soviet, yang memberi jejak sejarah bagi negeri ini.

### **1. Era Orde Lama**

Indonesia merupakan negara berdaulat yang dikenal dekat dengan banyak negara. Sejak era kolonialisme, Indonesia sudah menjalin hubungan kerjasama internasional, terutama dengan negara-negara di wilayah Asia itu sendiri. Karena, tentunya Indonesia juga memerlukan kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Terutama hubungan negara Indonesia dengan dua negara *superpower*, yaitu Amerika Serikat dan Rusia, sudah terlihat sejak perjuangan bangsa Indonesia dan pasca kemerdekaan bangsa Indonesia.

Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia sendiri, merupakan hubungan *love and hate relationship*, yaitu suatu ketika Indonesia bisa sangat dekat dengan Amerika Serikat dan di lain waktu hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menjadi renggang. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat sudah dimulai sejak era Presiden Soekarno. Namun, Presiden Soekarno sendiri dikenal sangat bertentangan dengan



















Indonesia saat itu mendapatkan tekanan hebat yang disebabkan oleh gerakan milisi Timor Timur untuk memerdekakan diri dari Indonesia dan besarnya tekanan internasional yang mengesahkan aneksasi militer Indonesia terhadap Timor Timur yang membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) mengeluarkan resolusi mengenai Timor Timur dan membuat Indonesia harus segera menyelesaikan konflik ini. Namun, pada era Presiden B.J. Habibie hubungan dengan Rusia diaktifkan kembali dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia, Yuri Maslyukov, ke Jakarta bulan Maret 1999, yang melakukan perundingan dengan Presiden B.J. Habibie, Menteri Pertahanan Keamanan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak untuk menandatangani persetujuan perdagangan, persetujuan kerjasama teknik dan ekonomi, dan persetujuan penghindaran pajak berganda.<sup>75</sup>

Pertumbuhan hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia kembali mengalami peningkatan, tepatnya pada tahun 2003, Indonesia menandatangani kontrak senilai 192 juta dolar AS dengan Rusia untuk memasok pesawat tempur multiperan Sukhoi melalui perusahaan asal Rusia, Rosoboronexport.<sup>76</sup> Kembalinya Indonesia membeli pesawat

---

<sup>75</sup> Emilia Yustiningrum, “*Enam Dekade Dinamika Persahabatan Indonesia-Rusia*”, diakses 28 Mei 2020, dalam <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/eropa/392-enam-dekade-dinamika-persahabatan-Indonesia-rusia->

<sup>76</sup> Rakesh Krishnan Simha, “*Mengapa Angkatan Udara Indonesia Ingin Su-35?*”, diakses 11 Maret 2020, dalam [https://id.rbth.com/technology/2015/05/13/mengapa\\_angkatan\\_udara\\_indonesia\\_inginkan\\_su-35\\_27803](https://id.rbth.com/technology/2015/05/13/mengapa_angkatan_udara_indonesia_inginkan_su-35_27803)





Memasuki perjalanan dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Presiden Jokowi 2014-2019 dan 2019-2024, hubungan kerjasama Indonesia dengan Rusia terus berlanjut dan tetap berjalan dengan baik. Pada tahun 2015, pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin menghasilkan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Rusia yang ditekankan pada dua sektor yaitu ekonomi dan pertahanan. Pada sektor ekonomi, Presiden Joko Widodo menyambut baik atas ketertarikan Presiden Rusia Vladimir Putin pada sektor kelapa sawit dari Indonesia. Sebab, ekspor kelapa sawit Indonesia ke Rusia merupakan ekspor sawit terbesar dengan nilai mencapai lebih dari USD 480 juta pada tahun 2015, dan tentunya akan mendatangkan manfaat bagi kedua negara.<sup>81</sup>

Dalam bidang pertahanan, di masa kepemimpinan Jokowi sendiri saat itu sedang memasuki pada Renstra Tahap II dan III (2015-2019, 2020-2024). Menyoroti kebijakan pertahanan di Renstra tahap II, dimana Kebijakan Umum Pertahanan Negara termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2015 yang mana akan berlaku dalam masa periode 2015-2019. Selain itu, Presiden Joko Widodo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2015-2019 sebagai bentuk penjabaran ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Salah satu isi dari RPJMN

---

<sup>81</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, “Indonesia-Rusia Pererat Kerjasama di Bidang Ekonomi dan Pertahanan”, diakses 1 Juni 2020, dalam [https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia-rusia\\_pererat\\_kerja\\_sama\\_di\\_bidang\\_ekonomi\\_dan\\_pertahanan](https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia-rusia_pererat_kerja_sama_di_bidang_ekonomi_dan_pertahanan)

tersebut adalah Pembangunan Industri Pertahanan Nasional untuk meningkatkan kemandirian pertahanan dan terpenuhinya Alutsista TNI di tiga matra. Salah satu strategi yang konkrit untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan pengadaan maupun pemeliharaan Alutsista TNI.<sup>82</sup>

Penguatan alutsista, salah satunya matra udara tentunya menjadi langkah yang strategis. Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia, Marsekal TNI Yuyu Sutisna memberikan penegasan bahwasanya kekuatan udara merupakan penangkal sekaligus penindak awal dalam menjaga kedaulatan Neegara Kesatuan Republik Indonesia, dan konflik di laut Natuna Utara beberapa waktu lalu merupakan *wake-up call* bagi para pemangku kebijakan, baik level eksekutif maupun legislatif.<sup>83</sup> Selanjutnya, perencanaan peremajaan alutsista termasuk pada sektor udara juga menjadi perhatian oleh Kementerian Pertahanan Indonesia (Kemhan RI) di masa periode pertama presiden Jokowi menjabat, yaitu Ryamizard Ryacudu. Pasca pertemuan Kemhan RI dengan Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2017 lalu, disepakati bahwa akan membeli sebanyak 11 buah pesawat Su-35.<sup>84</sup> Keputusan Indonesia untuk membeli pesawat Su-35 dari Rusia telah disepakati dalam nota kesepahaman (*Memorandum of*

---

<sup>82</sup> Buku I Agenda Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014, hlm. 6-15.

<sup>83</sup> Dispenau, "*Rapim Tahun 2020, Kasau : Pentingnya Kekuatan Udara dalam Menjaga Kedaulatan NKRP*", diakses 4 Juni 2020, dalam <https://tni-au.mil.id/rapim-tni-au-tahun-2020-kasau-pentingnya/>

<sup>84</sup> Rizkita Amalia, Naskah Publikasi Skripsi, "*Kebijakan Indonesia Membeli Pesawat Tempur SU-35 dari Rusia Tahun 2017*", (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : 2018), hlm. 2













dibandingkan dengan F-16 dan F-18, yang berbasis teknologi tahun 1970-an.<sup>94</sup>

Selain itu, pesawat tempur Sukhoi Su-35 mempunyai keunggulan tersendiri diantara pesawat tempur generasi ke 4 yang lainnya, yaitu dalam sistem kontrol terpadu baru yang dikembangkan oleh MNPK *Avionika Moscow-based Research and Production Association*. Dimana, kontrol tersebut secara bersamaan melakukan fungsi beberapa sistem, di antaranya kendali jarak jauh, kontrol otomatis, sistem sinyal pembatas, sistem sinyal udara, dan sistem pengereman roda sasis. Pesawat tempur Sukhoi Su-35 juga memiliki kecepatan supersonik sekitar 1,5 mach yakni dua kali kecepatan suara dan dianggap mampu melampaui pesawat tempur siluman generasi kelima F-22 Raptor buatan Amerika Serikat.<sup>95</sup> Selain itu, Su-35 juga dilengkapi sistem kontrol radar baru dengan antena *array* bertahap (Irbis-E) yang memiliki keistimewaan dalam mendeteksi dan melacak hingga 30 target udara, mempertahankan kontinuitas pengamatan ruang dan melibatkan hingga delapan sasaran, dan dapat mendeteksi target udara dengan penampang mutlak 3 m<sup>2</sup> pada jalur langsung pada jarak hingga 400 km.<sup>96</sup> Selain itu, kelebihan pesawat tempur Sukhoi Su-35 daripada pesawat

---

<sup>94</sup> Rakesh Krishnan Simha, “Mengapa Angkatan Udara Indonesia Ingin Su-35?”, diakses 11 Maret 2020, dalam [https://id.rbth.com/technology/2015/05/13/mengapa\\_angkatan\\_udara\\_indonesia\\_inginkan\\_su-35\\_27803](https://id.rbth.com/technology/2015/05/13/mengapa_angkatan_udara_indonesia_inginkan_su-35_27803)

<sup>95</sup> SindoNews, “Kecanggihan Sukhoi Su-35, Banyak Rudal dan Melampaui Siluman”, diakses 26 Juli 2020, dalam <https://nasional.sindonews.com/berita/976056/14/kecanggihan-sukhoi-su-35-banyak-rudal-dan-melampaui-siluman>

<sup>96</sup> GenPi.co, “Indonesia Bikin Jantungan Australia, Sukhoi -35 Rusia vs F-35 AS”, diakses 10 April 2020, dalam







strategis. Namun, pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 yang sejatinya hanya dilakukan oleh Indonesia dan Rusia mendapat perhatian oleh Amerika Serikat. Karena, pada dasarnya Amerika Serikat memiliki tujuan tersendiri dengan ikut campur dalam kerjasama pertahanan Indonesia dengan Rusia berupa sanksi kepada kedua belah pihak.

Persaingan dibidang militer antara Rusia dan Amerika Serikat dalam sektor militer, bisa menjadi kendala tersendiri bagi Indonesia dalam memutuskan pembelian pesawat Sukhoi Su-35 dari Rusia. Sebab, Amerika Serikat bisa saja sewaktu-waktu menjatuhkan sanksi kepada Indonesia dan juga untuk pemerintah Rusia apabila kedua negara tetap melanjutkan negosiasi tersebut. Amerika memang memiliki undang-undang yang dapat memberikan sanksi terhadap negara lain, yaitu negara yang sedang menjalin kerjasama utamanya dalam hal transaksi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan musuh Amerika Serikat seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran atau disebut dengan *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)*.<sup>100</sup> Dengan adanya Undang-Undang tersebut, tentunya akan mempengaruhi hubungan setiap negara yang sudah menandatangani kerjasama dengan Amerika Serikat untuk bekerjasama dengan ketiga negara yang masuk didalam UU CAATSA, dan bisa saja suatu negara tersebut tidak bebas dalam menentukan arah politiknya dan kebijakan luar negerinya, termasuk dalam bidang pertahanan.

---

<sup>100</sup> Adam Rizal, "Takut Sanksi AS, RI Terancam Batal Beli Sukhoi Su-35", diakses 9 Juni 2020, dalam <https://www.senayanpost.com/takut-sanksi-as-ri-terancam-batal-beli-sukhoi-su-35/>

CAATSA sendiri terbentuk berawal dari tidak harmonisnya hubungan kedua negara tersebut yang diperparah dengan adanya sejumlah permasalahan seperti Rusia dituduh membantu kelompok pemberontak di Ukraina dalam referendum Crimea, dan menopang Pemerintah Suriah dalam perang sipil dan ikut campur dalam keterlibatan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 silam.<sup>101</sup> Selain itu, aturan tersebut dirancang untuk memperluas hukuman berupa sanksi dan embargo kepada sejumlah negara yang membeli senjata dari Iran dan Rusia, serta menjalin hubungan dagang dengan Korea Utara. Langkah tersebut diloloskan oleh senat Amerika Serikat, setelah disetujui Dewan Perwakilan Amerika Serikat, dan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh presiden Donald Trump pada 2 Agustus 2017.<sup>102</sup> Dengan disahkannya UU CAATSA tersebut, tentunya Amerika Serikat bisa saja memperluas hegemoninya dengan mempengaruhi negara-negara lain yang bergantung kepadanya, dengan tidak menjalin kerjasama dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara.

Oleh karena itu, melalui UU CAATSA, Amerika Serikat mengancam akan memberikan sanksi, baik kepada Indonesia dan Rusia kapan saja, apabila Indonesia dan Rusia tetap melanjutkan transaksi

---

<sup>101</sup> Dian Naren Budi Prasiti, “*Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement Inkonsistensi Kebijakan Countering America’s Adversaries Through Sanctions ACT (CAATSA): Studi Kasus Pembelian Senjata S-400 India*”, E-Jurnal Universitas Airlangga, 2019, Hlm. 214

<sup>102</sup> CNN Indonesia, “*CAATSA, Jurus AS Halangi Peminat Alutsista Rusia*”, diakses 12 Januari 2020, dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200122064416-106-467483/caatsa-jurus-as-halang-i-peminat-alutsista-rusia>

pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35. Menurut Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia, V Kopylov, bayang-bayang sanksi Amerika Serikat itu tidak hanya mengancam Indonesia saja, namun juga semua negara yang ingin bermitra dengan Rusia terutama dibidang pertahanan.<sup>103</sup> Hal ini tentunya tidak mengherankan, karena saat ini memang negara kuat dan mampu menyaingi dominasi Amerika Serikat dalam bidang pertahanan, salah satunya adalah negara Rusia. Selain itu, Kopylov juga mengatakan bahwasannya seperti kasus Turki, kasus India, dan kasus China, Amerika Serikat mencoba mencegah negara-negara sahabat Rusia untuk bekerja sama dengan Rusia di ranah militer dan teknis, hal ini cukup dipahami karena Amerika Serikat juga memiliki industri teknis militer yang besar dan kuat, serta Amerika Serikat merupakan eksportir senjata terbesar di dunia, namun persaingan tersebut merupakan persaingan yang tidak adil.<sup>104</sup> Dalam “*Putin List*” yang diungkapkan oleh presiden Rusia, Vladimir Putin, menjelaskan bahwa apa yang disebut dengan sanksi oleh Amerika Serikat terhadap Rusia, berlaku pada semua orang-orang Rusia yang berada di pemerintahan dan *businessmen*, serta merupakan bentuk

---

<sup>103</sup> CNN Indonesia, “*Rusia Bicara Ancaman AS jika RI Beli Jet Tempur Su-35*”, diakses 10 Januari 2020, dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191219091114-106-458246/rusia-bicara-ancaman-as-jika-ri-beli-jet-tempur-su-35>

<sup>104</sup> Tommy Kurnia, “*Amerika Serikat Ancam Indonesia agar Tidak Beli Sukhoi Rusia?*”, diakses 24 Juli 2020, dalam <https://www.liputan6.com/global/read/4137146/amerika-serikat-ancam-indonesia-agar-tak-beli-su-khoi-rusia>







menimbang-nimbang keputusannya dan mengevaluasinya.<sup>113</sup> Namun dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoygu, pada 28 Januari 2020, di Moskow, Menteri Prabowo Subianto mengisyaratkan untuk tetap melanjutkan rencana pembelian 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia senilai US\$ 1,14 miliar tersebut.<sup>114</sup> Hal tersebut juga diperkuat oleh Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, bahwasanya Indonesia tidak pernah membatalkan kontrak pembelian Sukhoi Su-35, dan tidak pernah merasa tertekan dengan Amerika Serikat.<sup>115</sup>

Pada realitanya, beberapa negara yang melakukan kerjasama dalam pengadaan senjata dengan Rusia, tidak secara jelas mendapatkan sanksi seperti apa yang dimaksud oleh Amerika Serikat melalui CAATSA. Salah satunya adalah negara India. Dimana, pada 5 oktober 2018 lalu, India menyepakati penandatanganan kontrak dalam pembelian rudal S-400 dari Rusia, justru mendapatkan jaminan bebas sanksi dari Amerika Serikat. Jaminan ini disampaikan oleh Senator dari Oklahoma, Jim Inhofe yang menganggap ketiga negara seperti India, Vietnam dan Indonesia adalah sekutu strategis Amerika Serikat di Asia yang sedang

---

<sup>113</sup> Dimas Jarot Bayu, “Prabowo Tak Akan Terburu-buru Putuskan Beli Sukhoi dari Rusia”, diakses 12 Juni 2020, dalam <https://katadata.co.id/berita/2020/02/06/prabowo-tak-akan-terburu-buru-putuskan-beli-sukhoi-dari-rusia>

<sup>114</sup> Pingit Aria, “Kecanggihan Sukhoi Su-35, Pesawat Tempur Rusia yang Ditaksir Prabowo”, diakses 12 Juni 2020, dalam <https://katadata.co.id/berita/2020/02/06/kecanggihan-sukhoi-su-35-pesawat-tempur-rusia-yang-ditaksir-prabowo>

<sup>115</sup> Our Bureau, “Su-35 Still In Indonesia’s Jet Race Against F-35”, diakses 23 Juni 2020, dalam [https://www.defenseworld.net/news/26552/Su\\_35\\_Still\\_In\\_Indonesia\\_\\_\\_s\\_Jet\\_Race\\_Against\\_F\\_35#.XvIJGzIV](https://www.defenseworld.net/news/26552/Su_35_Still_In_Indonesia___s_Jet_Race_Against_F_35#.XvIJGzIV)





Vorobieva, mengatakan bahwa Indonesia tidak akan rugi membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35, karena Indonesia akan memiliki salah satu alat utama sistem persenjataan terbaik di dunia.<sup>118</sup>

Penundaan tersebut tentunya akan merugikan pihak Indonesia, mengingat Indonesia, khususnya skadron 14 TNI Angkatan Udara benar-benar membutuhkan pesawat tempur untuk menggantikan F-5E *Tiger* yang sudah berusia kurang lebih 33 tahun dan secara teknologi sudah ketinggalan zaman. Selain itu, pentingnya pemerintah Indonesia melakukan peremajaan atau modernisasi alutsista dengan membeli pesawat Sukhoi Su-35 adalah untuk kebutuhan pemerintah Indonesia dalam penguatan matra udara. Sebab, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sendiri, diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, bahwasanya Kementerian Pertahanan setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun, anggaran untuk penguatan pertahanan terus ditingkatkan.<sup>119</sup> Oleh karena itu, TNI Angkatan Udara mulai melirik pesawat tempur modern generasi 4,5, salah satunya adalah Sukhoi Su-35 buatan Rusia tersebut.<sup>120</sup> Untuk menunjang kebutuhan tersebut, TNI Angkatan Udara dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tentunya sudah menimbang aspek-aspek yang masuk kedalam kriteria penilaian yang diharapkan. Ketertarikan TNI Angkatan Udara terhadap pesawat tempur

---

<sup>118</sup> Chandra Gian Asmara, “Prabowo Komentari Pembelian 11 Unit Sukhoi Su-35 Rp15,57 T”, diakses 4 Juli 2020, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200206191359-4-135944/prabowo-komentari-pembelian-11-unit-sukhoi-su-35-rp1557-t>

<sup>119</sup> FIN, “Moment Modernisasi Alutsista”, diakses 24 Juli 2020, dalam <https://fin.co.id/2020/06/17/moment-modernisasi-alutsista/>

<sup>120</sup> TNI Angkatan Udara, “Mencari Pengganti F-5E Tiger TNI AU”, diakses 5 Juli 2020, dalam <https://tni-au.mil.id/mencari-pengganti-f-5e-tiger-tni-au/>

Sukhoi Su-35, diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Staff Angkatan Udara, Marsekal TNI Yuyun Sutisna saat melaksanakan kunjungan kerja ke Landasan Udara Iswahjudi Madiun, Jawa Timur, 18 Maret 2019, bahwasannya pesawat tempur Sukhoi Su-35 direncanakan menjadi pengganti pesawat F5 Tiger II yang dioperasikan oleh Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi Madiun.<sup>121</sup>

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tentunya segera mengambil langkah strategis dengan adanya penundaan pengiriman pesawat tempur Sukhoi Su-35 tersebut. Dimana, langkah yang diambil adalah respon yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Rusia atas penundaan pengiriman pesawat tempur Sukhoi Su-35. Respon yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yaitu kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Moskow pada 28 Januari 2020 dan saat parade hari kemenangan Rusia pada tanggal 23 Juni 2020 sebagai bagian dari diplomasi pertahanan dengan negara-negara sahabat. Diplomasi dalam bidang pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam kesepakatan pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dengan Rusia termasuk dalam *Defense diplomacy for defense capabilities*. Dimana diplomasi tersebut merupakan diplomasi yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara dalam bentuk material dan dilakukan dalam tataran internal dan eksternal. Khusus dalam tataran eksternal instrumen diplomasi memainkan peranan penting agar memungkinkan bagi sebuah negara untuk dapat

---

<sup>121</sup> Anggaraman Saragih, "Sukhoi Su-35 Menjadi Pengganti F5 Tiger II TNI AU", diakses 5 Juli 2020, dalam <https://jakartagreater.com/230786/sukhoi-su-35-menjadi-pengganti-f5-tiger-ii-tni-au/>

melakukan pembelian senjata bagi kepentingan pengembangan kekuatan pertahanannya dari negara lain.<sup>122</sup>

Diplomasi dalam bidang pertahanan memang cenderung dilakukan oleh suatu negara dalam bentuk kerjasama pertahanan dan bantuan militer, dan merupakan bagian dari politik internasional serta perimbangan kekuatan untuk memberikan keamanan dalam lingkup nasionalnya. Negara Indonesia tentunya harus terlibat dalam kerjasama pertahanan dengan Rusia dalam memodernisasi alutsistanya, yaitu dalam hal ini pesawat tempur Sukhoi Su-35 dengan tujuan untuk mengimbangi atau menggentarkan musuh, memenej perluasan pengaruh, dan mendukung rezim yang bersahabat dalam menekan lawan politik domestik atau memposisikan kepentingan komersial negaranya.<sup>123</sup> Oleh karena itu, kebutuhan Indonesia untuk menunjang penguatan matra udaranya dengan membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35 merupakan hal yang rasional, mengingat pesawat tempur Sukhoi Su-35 sendiri akan digunakan untuk memperkuat pertahanan matra udara Indonesia.

Pemerintah Indonesia melakukan kunjungan bilateral ke Rusia sendiri termasuk dalam diplomasi pertahanan terkait penundaan pengiriman pesawat tempur Sukhoi Su-35 oleh Rusia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang diwakilkan langsung oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dengan didampingi oleh Duta Besar

---

<sup>122</sup> Ron Matthews, "Introduction: 'Managing' the Revolutions", dalam Ron Matthews dan John Treddnick, *Managing the Revolution in Military Affairs* (New York: Palgrave MacMilan), hlm. 1-9, dalam skripsi Arifin Multazam, "*Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*", (Jakarta : UI Press, 2010), hlm. 20.

<sup>123</sup> Hans J. Morgenthau, "*Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*", (New York: Alfred Knopf, 1948), Hal. 6.





penyuplaian alutsista modern, dan sebagai negara independen tentunya Indonesia bebas menentukan bekerjasama dengan siapa saja, termasuk dalam pembelian Sukhoi Su-35 dengan Rusia yang akan tetap dilanjutkan dan disinggung saat pertemuan tersebut.<sup>129</sup> Pernyataan yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, bahwasannya Indonesia tidak pernah membatalkan kontrak pembelian Sukhoi Su-35, dan tidak pernah merasa tertekan dengan Amerika Serikat.<sup>130</sup> Karena memang, salah satu faktor yang menghambat pengiriman pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia adalah adanya UU CAATSA yang diterapkan oleh Amerika Serikat untuk negara-negara yang melakukan kerjasama pertahanan dengan Rusia. Meskipun ada kendala lain semisal pendanaan secara tunai imbal dagang, dimana kedua negara masih mengosiasikan mata uang untuk menggantikan dolar Amerika Serikat.

Selanjutnya, dalam pertemuan pada bulan Juni 2020, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto berada di Rusia selama dua hari. Dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Formin, kedua belah pihak membicarakan hubungan bilateral dan kerja sama di berbagai bidang termasuk pendidikan, latihan bersama, serta kerjasama

---

<sup>129</sup> Chandra Gian Asmara, “Prabowo Komentari Pembelian 11 Unit Sukhoi Su-35 RP15,57 T”, diakses 23 Juli 2020, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200206191359-4-135944/prabowo-komentari-pembelian-11-unit-sukhoi-su-35-rp1557-t>

<sup>130</sup> Our Bureau, “Su-35 Still In Indonesia’s Jet Race Against F-35”, diakses 23 Juni 2020, dalam [https://www.defenseworld.net/news/26552/Su\\_35\\_Still\\_In\\_Indonesia\\_\\_\\_s\\_Jet\\_Race\\_Against\\_F\\_35#.XvIJGgzbIV](https://www.defenseworld.net/news/26552/Su_35_Still_In_Indonesia___s_Jet_Race_Against_F_35#.XvIJGgzbIV)













## B. Saran

Peneliti sadar dan paham, bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi yang berjudul “Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Penundaan Pengiriman Pesawat Tempur Sukhoi Su-35 oleh Rusia Tahun 2019” masih terdapat banyak kekurangan baik secara penulisan ataupun dalam analisis data. Oleh karena itu, peneliti akan memberi saran bagi pihak yang mungkin akan meneliti isu yang sama dengan peneliti angkat. Saran yang pertama adalah, pembahasan mengenai respon pemerintah Indonesia terhadap penundaan pengiriman pesawat Sukhoi Su-35 oleh Rusia lebih dijelaskan lebih jauh, mengingat alutsista Rusia memiliki teknologi modern yang mampu menyaingi alutsista Amerika Serikat dan keduanya sama-sama mempunyai *power* untuk mempengaruhi Indonesia dalam pengadaan alutsista. Saran yang kedua adalah, Sukhoi Su-35 merupakan pesawat yang akan digunakan pemerintah Indonesia untuk menggantikan F-5 Tiger, maka penting bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam lagi bagaimana pemerintah Rusia dalam mempengaruhi pemerintah Indonesia agar memilih Sukhoi Su-35 daripada pesawat tempur yang lain. Peneliti berargumen bahwa kedua saran tersebut dapat melengkapi analisis penelitian ini, yang mana analisis peneliti masih kurang dalam penelitian ini.











- CNN Indonesia. 2018. "Sejarawan: Soeharto Kepala Negara Terkorup di Dunia". Diakses 21 Juni 2020, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181207044538-20-351756/sejarawan-soeharto-kepala-negara-terkorup-di-dunia>
- Cotter, Andrew, A., Forster. 2004. "Chapter 1: Strategic Engagement: Defence Diplomacy as a Means of Conflict Prevention". Adelphi Papers, 44: 365. New York: Routledge.
- Danudoro, Dhendra. 2016. "Russia and Indonesia: Renewal of Defense Cooperation". Diakses 7 Februari 2020, dalam <http://www.leksika.org/tacticalanalysis/2016/10/26/russia-and-indonesia-renewal-of-defense-cooperation>
- Darmono, Bambang. 2010. "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia". Jurnal Keahanan Nasional. 1(15): 7-8 & 17-18.
- Dispenau. 2020. "Rapim Tahun 2020, Kasau : Pentingnya Kekuatan Udara dalam Menjaga Kedaulatan NKRI". Diakses 4 Juni 2020, dalam <https://tni-au.mil.id/rapim-tni-au-tahun-2020-kasau-pentingnya/>
- Djorjevic, Alexander. 2018. "Sanctions in "Dry" Balance: Russians Su-35 Faces U.S. Obstacles in Indonesia". Diakses 18 Juli 2020, dari <https://www.kommersant.ru/doc/3760152>
- Dw.com. 2018. "Kenapa AS Menghibahkan 24 Jet Tempur F-16 Kepada Indonesia?". Diakses 4 Juli 2020, dalam <https://www.dw.com/id/kenapa-as-menghibahkan-24-jet-tempur-f-16-kepada-indonesia/a-42765840>
- FIN. 2020. "Moment Modernisasi Alutsista". Diakses 24 Juli 2020, dalam <https://fin.co.id/2020/06/17/moment-modernisasi-alutsista/>
- GenPi.co. 2020. "Indonesia Bikin Jantungan Australia, Sukhoi -35 Rusia vs F-35 AS". Diakses 10 April 2020, dalam <https://www.genpi.co/berita/34784/indonesia-bikin-jantungan-australia-sukhoi-35-rusia-vs-f-35-as?page=3>
- Globalsecurity.org. 2017. "SU-35BM (Bolshaya Modernizatsiya-Big Modernization)". Diakses 27 Februari 2020, dalam <https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/su-35bm.htm>
- Global Fire Power. 2020. "Indonesia Military Strength (2020)". Diakses 4 Juni 2020, dalam [https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country\\_id=indonesia](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia)

- Hanggoro, Hendaru Tri. ND. “Asal Usul Istilah Perang Dingin”. Diakses 20 Mei 2020, dalam <https://historia.id/militer/articles/asal-usul-istilah-perang-dingin-6joeJ>
- Indonesia Investments. ND. “Keajaiban Orde Baru Suharto di Indonesia”. Diakses 28 Mei 2020, dalam <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247?>
- Isnaeni, Hendri F. ND. “Awal Mula Indonesia Mengutang pada IMF”. Diakses 12 Juni 2020, dalam <https://historia.id/politik/articles/awal-mula-indonesia-mengutang-pada-imf-vQXVZ>
- Irmanirawan. 2014. “Pentingnya Kawasan Perbatasan Bagi Kedaulatan Bangsa”. Diakses 6 Januari 2020, dalam <http://perbatasan-dev.unmul.ac.id/?p=4&a=&b=12>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 2018. “Kemaritiman Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa”. Diakses 3 Januari 2020, dari <http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>
- Kementerian Luar Negeri RI. 2019. “Pertamina dan Rosneft Lanjutkan Kerjasama Pembangunan Kilang Minyak Tuban”. Diakses 8 Juni 2020, dalam <https://kemlu.go.id/portal/id/read/740/berita/pertamina-dan-rosneft-lanjutkan-kerja-sama-pembangunan-kilang-minyak-tuban>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2020. “Tingkatkan Kerjasama, Menhan Prabowo Temui Menhan Rusia”. Diakses 23 Juli 2020, dalam <https://kemlu.go.id/moscow/id/news/4498/tingkatkan-kerja-sama-menhan-prabowo-temui-menhan-rusia#>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2020. “Kunjungan Menhan Prabowo ke Rusia”. Diakses 5 Juli 2020, Lihat *Posting-an* Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di <https://www.instagram.com/p/CByCCTSFyBp/>
- Kementerian Petahanan Republik Indonesia, “Alasan Menhan Ryamizard Ingin Beli Pesawat Sukhoi Baru”. diakses 25 Juli 2020, dalam <https://www.kemhan.go.id/itjen/2015/09/03/alasan-menhan-ryamizard-ingin-beli-pesawat-sukhoi-baru.html>
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2016. “Indonesia-Rusia Pererat Kerjasama di Bidang Ekonomi dan Pertahanan”. Diakses 1 Juni 2020, dalam





